

**ANALISIS PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PADA INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA (INAP) TIMOR LESTE**

Disusun Oleh:

NAMA : AUGUSTO DA COSTA
NIM : 2443021075
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap,)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2026**

**ANALISIS PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PADA INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA (INAP) TIMOR LESTE**

Disusun Oleh:

NAMA : AUGUSTO DA COSTA
NIM : 2443021075
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan
Administrasi Publik (M.Tr.Ap.)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2026**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Augusto da Costa
Nim : 2443021075
Jurusan : Administrasi Publik
Program studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa): Analisis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Pada Instituto Nacional da
Administração Pública (INAP) Timor Leste
Judul Tesis (Inggris) : *Analysis of Improving the Quality of Government
Financial Reports at the Instituto Nacional Da
Administração Pública (INAP) Timor Leste*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Tesis



Prof. Dr.Nurliah Nurdin, MA

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Augusto da Costa
Nim : 2443021075
Jurusan : Administrasi Publik
Program studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Analisis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Timor Leste
Judul Tesis (Inggris) : *Analysis of Improving the Quality of Government Financial Reports at the Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Timor Leste*

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:
Hari : Senin
Tanggal : 13 April 2026
Pukul : 13.00 sampai selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS OLEH PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Edy Sutrisno, M.Si
Sekretaris : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd
Anggota : Dr. Hamka, MA
Pembimbing : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKA TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah in :

Nama : Augusto da Costa
Nim : 2443021075
Jurusan : Administrasi Publik
Program studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tugas akhir yang telah saya buat dengan judul **“Analisis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Timor Leste”** merupakan hasil karia saya sendiri dan benar keaslian. Apabila di kemudian hari penulis tugas akhir ini merupakan hasil Plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia **menerima sanksi** berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 13 April 2026

Peneliti



Augusto da Costa

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia yang telah memberikan kekuatan serta keyakinan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan tesis dengan judul “**Analisis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Timor Leste**”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap) pada program pascasarjana (S2) Magister Administrasi Publik Politeknik STIA LAN Jakarta.

Peneliti menyadari bahwa selama proses penyusunan tesis ini masih mengalami banyak hambatan dan kekurangan yang tidak mungkin dapat dilalui tanpa dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa syukur dan Terimakasih sebesar besarnya kepada :

1. Ibu Prof, Dr. Nurliah Nurdin, MA, Selaku Direktur politeknik STIA LAN Jakarta, selaku Dosen Pembimbing dengan penuh kesabaran dan dedikasi, tersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan petunjuk, dan pengarahan kepada peneliti dalam menyusun tesis ini.
2. Ketua dan sekretaris program studi administrasi Pembangunan negara magister terapan, segenap dosen beserta staf politeknik STIA LAN yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti mengikuti perkuliahan di politeknik STIA LAN Jakarta.
3. Para nara sumber (*Key-Informan*) dan pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah bersedia memberikan informasi dan bantuan kepada peneliti dalam Menyusun tesis ini.
4. Bapak Policarpo A. Boavida selaku director umum(*director geral*) **Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Timor Leste**” Bersama sturktur dan jajarannya .

5. Istri tercinta Carmelita Gonçalves, anak-anakku tersayang Keyla, Querina, Cayros, Deycia, Afoco dan kedua almarhum Orang Tua atas segala dukungan moral dan material serta doa yang telah diberikan kepada peneliti selama ini.
6. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah membantu peneliti ini, mohon maaf bila Namanya tidak disebutkan oleh peneliti.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu dengan kerendahan hati menerima segala kritik dan saran bersifat konstruktif demi perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik dibidang Administrasi Pembangunan Negara Khususnya Manajemen Keuangan Negara. Semoga Tuhan senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi kita semua. Amin.

Jakarta, 13 April 2026

Peneliti,

Augusto da Costa

ABSTRAK

Analisis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Timor Leste

¹**Augusto da Costa.** augustodacosta1980@gmail.com

²**Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA.** nurliah_nurdin@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Timor-Leste masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi serapan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program dan efektivitas kelembagaan. Kondisi tersebut berkaitan dengan kualitas laporan keuangan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab belum optimalnya kualitas laporan keuangan pada INAP Timor-Leste serta merumuskan strategi peningkatan kualitas laporan keuangan lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas serta merumuskan upaya peningkatannya. Kerangka analisis mengacu pada enam dimensi kualitas pelaporan keuangan, yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap standar akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, transparansi dan akuntabilitas manajerial, serta komitmen manajemen oleh Tjiptono dan Diana (2019). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan sepuluh informan kunci. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen dengan teknik triangulasi untuk memastikan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan memerlukan penguatan kompetensi SDM, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan.

Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, Akuntabilitas.

ABSTRACT

Analysis of Improving the Quality of Government Financial Reports at the Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) in Timor Leste

¹**Augusto da Costa.** augustodacosta1980@gmail.com

²**Prof. Dr.Nurliah Nurdin, MA.** nurliah.nurdin@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Timor-Leste's National Institute of Public Administration (INAP) continues to face challenges in optimizing budget absorption, which impacts program implementation and institutional effectiveness. This condition is related to the quality of financial reports, which do not fully reflect the principles of transparency and accountability. This study aims to explain the causes of the suboptimal quality of financial reports at INAP Timor-Leste and to formulate strategies to improve the quality of financial reports to be more transparent, accountable, and high-quality, as well as formulate efforts to improve these. The analytical framework refers to six dimensions of financial reporting quality: human resource competency, internal control systems, compliance with accounting standards, utilization of information technology, managerial transparency and accountability, and management commitment as described by Tjiptono and Diana (2019). The study used a qualitative approach involving ten key informants. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis using triangulation techniques to ensure data validity. The results indicate that improving the quality of financial reports requires strengthening human resource competencies, developing information technology infrastructure, and enhancing transparency, accountability, and continuous evaluation mechanisms. Keywords: quality of financial reports, human resources, internal control systems, transparency, accountability.

Keywords: Quality Of Financial Reports, Human Resources, Internal Control Systems, Transparency, Accountability.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A, Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	22
C. Rumusan Masalah.....	22
D. Tujuan Penelitian.....	23
E. Manfaat Penelitian.....	23
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Penelitian Terdahulu.....	25
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritas.....	40
1. Tinjauan Kebijakan.....	40
a. Anggaran pendapatan dan belanja negara (pasal 145).....	41
b. Undang-Undang no. 2/2022.....	41
c. Undang-undang no. 15/2022, tertanggal 21 Desember.....	42
d. UU No. 71 tahun 2022 perubahan pertama atas UU No. 15 TAHUN 2017.....	42
e. Aturan Pemerintah No 38/2012 (Dec Lei CFP, Ba Formasaun No 38/2012).....	43

2. Tinjauan Teoritas.....	43
a. Administrasi.....	43
1) Administrasi Publik.....	44
2) Perkembangan Administrasi Publik	45
3) Administrasi Pembangunan.....	46
b. Administrasi Publik Dan Kebijakan Publik Di Indonesia	46
1) Administrasi sebagai Proses Sosial dan Politik.....	47
2) .Administrasi sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat.....	47
3) Prinsip Good Governance sebagai Fondasi Adminstras Modern.....	47
4) Peran Strategis Aparatur dalam Mewujudkan Administrasi Berkualitas.....	48
5) Administrasi Responsif terhadap Konteks Lokal.....	48
6) Etika Administrasi dan Moralitas Kebijakan	49
c. Pengawasan Internal sebagai Fondasi Akuntabilitas.....	49
1) Transparansi sebagai Representasi Keterbukaan Pemerintahan....	50
2) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan....	60
d. Teori Agensi dalam Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah...63	
1) Standar Akuntansi Pemerintah dan Implementasinya	64
2) Pemanfaatan Teknologi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.....	65
3) Pengaruh Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	66
4) Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Menurut Tjiptono & Diana (2019).....	67
C. Kerangka Berpiki.....	69
BAB III.METODOLOGI PENELITIAN.....	73
A.Metodologi Penelitian.....	72
B.Teknik Pengumpulan Data.....	74

C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	76
D. Prosedur Validasi Data.....	77
E. Instrumen Penelitian.....	78
F. Informan.....	78
BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	84
A. Gambaran Umum Instituto Nacional da Administração Pública (INAP).....	84
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	88
1. Penyebab Kualitas Laporan Keuangan Pada Instituto Nacional da Administração Pública, INAP Belum Optimal.....	88
a. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).....	91
b. Sistem Pengendalian Internal (SPI).....	105
c. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi,.....	110
d. Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	116
e. Transparansi dan Akuntabilitas Manajeri.....	119
f. Komitmen Manajemen Terhadap Kualitas Pelaporan.....	121
2. Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada Program di Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)	125
a. Fokus Pada Pengguna (<i>Customer Focus</i>).....	126
b. Kepemimpinan (<i>Leadership Commitment</i>).....	129
c. Keterlibatan pegawai (<i>employee involvement</i>).....	132
d. Prinsip Perbaikan Berkelanjutan (<i>Continuous Improvement</i>).....	134
BAB V PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....	142
LAMPIRAN.....	148

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Keuangan INAP.....	8
Tabel 1.6 Perbandingan Laporan Keuangan.....	20
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	39



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar Grafik 1.1.....	5
Gambar Grafik 1.2.....	10
Gambar Neraca Keuangan 1.3.....	12
Gambar Grafik.1.4.....	16
Gambar Kerangka Berpikir 2.1.....	73

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika tata kelola pemerintahan *modern*, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik telah menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas kinerja dan integritas suatu negara. Temuan dari *World Bank* serta *Transparency International* memperlihatkan bahwa negara yang memiliki sistem pelaporan keuangan yang tertata dan informatif cenderung memperoleh skor lebih tinggi dalam indeks kinerja pemerintahan dan integritas sektor publik. Sejalan dengan itu, penerapan standar internasional seperti *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) mendorong setiap institusi publik untuk menyusun laporan keuangan yang relevan, andal, dan berbasis aktual. Hal ini tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial kepada masyarakat luas.¹

Di kawasan Asia Tenggara, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara Indonesia dan Timor-Leste dalam aspek kualitas laporan keuangan serta pengelolaan fiskal. Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam akuntabilitas keuangan negara, tercermin dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang secara konsisten diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) selama beberapa tahun terakhir. (LKPP Tahun 2023 diberitakan pada 16 Juli 2024 oleh Media Keuangan Kementerian Keuangan).

Selain itu, Indonesia juga mencatat pertumbuhan aset tetap dan peningkatan investasi jangka panjang yang berkesinambungan. Sebaliknya, Timor-Leste masih menghadapi berbagai tantangan struktural dalam tata kelola keuangannya. Tingkat realisasi anggaran tahunan cenderung rendah, sementara

¹ Kohler & Bowra, (2020)

ketergantungan terhadap Dana Perminyakan masih sangat tinggi. Evaluasi terhadap kinerja belanja dan akuntabilitas publik di Timor-Leste juga menunjukkan stagnasi, sebagaimana disoroti dalam laporan *Public Expenditure and Financial Accountability Assessment* (PEFA) serta publikasi tahunan dari organisasi pemantau kebijakan seperti La'o Hamutuk. (Menurut *Public Financial Management Performance Measurement Framework*, 2016, 2022.dan La'o Hamutuk²

Pelaksanaan belanja pemerintah tahun 2023 tidak menggambarkan capaian nilai kinerja dalam pengelolaan belanja pemerintah Timor Leste, Pada tanggal 1 Juli 2023 terjadi pergantian Pemerintahan Konstitusional VIII menjadi Pemerintahan IX. Konstitusional, yang memperbaiki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2023. Pada tanggal 10 Agustus, Pemerintah Konstitusional IX menyampaikan proposal *Orçamento Geral do Estado (OGE)*, baru ke Parlemen Nasional dengan persetujuan akhir US\$ 1.960.477.418,00, menunjukkan pengurangan anggaran sebesar 9%, atau US\$ 195.237.888,00, setelah penyearah. Pemerintah Konstitusi IX mendistribusikan anggaran pada subsektor Administrasi Pusat sebesar US\$ 1.633.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar 9,3% dibandingkan dengan anggaran awal untuk sektor ini, untuk Jaminan Sosial USD 243.715.306,00 (termasuk FRSS) dengan peningkatan sebesar 3% dan RAEOA US\$83.762.112, menurun sebesar 30%. Dengan cara ini, pelaksanaan *Orçamento Geral do Estado* untuk semua semua sektor hingga akhir tahun 2023 menunjukkan tingkat eksekusi sebesar 76%. Berdasarkan hasil dari laporan keuangan tersebut pada periode tahun2023, menggambarkan lemahnya seluruh para administrator pemerintah dalam pengimplementasian anggaran sehingga dalam pelaksanaan anggaran hanya pada 76% (*Decreto-Lei N.º 1/2023 de 25 de Janeiro*)³

Dalam lingkup nasional, Pemerintah Timor-Leste dihadapkan pada tantangan serius dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran negara secara

².Menurut *Public Financial Management Performance Measurement Framework*, 2016, 2022.dan La'o Hamutuk (berbagai laporan 2010–2023)

³. (*Decreto-Lei N.º 1/2023 de 25 de Janeiro*)

efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan laporan *relatório de execução anual do orçamento geral do estado*, tingkat pelaksanaan belanja hanya mencapai sekitar 76% dari total anggaran yang telah disetujui. Rendahnya tingkat penyerapan ini bukan sekadar soal administratif, tetapi mencerminkan persoalan mendasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan fiskal di berbagai institusi pemerintahan. Ketidakseimbangan ini memperlihatkan adanya celah dalam sistem tata kelola anggaran dan mempertegas pentingnya reformasi dalam pelaporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan yang akurat dan informatif menjadi landasan utama untuk mendukung pengambilan keputusan fiskal yang tepat dan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. (*Ministério das Finanças Timor-Leste, edisi terbaru tahun 2023*.⁴

Secara kelembagaan, di Instituto Nacional da Administração Pública Timor-Leste memegang peranan strategis dalam mendukung reformasi birokrasi nasional melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara. Dalam menjalankan mandat tersebut, *Instituto Nacional da Administração Pública* secara berkelanjutan memperoleh alokasi anggaran negara untuk menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, terlihat adanya ketidaksesuaian yang cukup mencolok antara anggaran yang telah direncanakan dan tingkat realisasi belanjanya. Dari total anggaran sebesar \$1.037.825, realisasi penggunaan hanya mencapai 72,8%, menyisakan lebih dari \$279.000 yang tidak dimanfaatkan. Tidak terserapnya anggaran ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan keuangan internal, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun dalam sistem pelaporan yang seharusnya menjadi dasar akuntabilitas publik.⁵

⁴.Ministério das Finanças Timor-Leste, edisi terbaru tahun 2023.dan Allen dan Tommasi (2001)

⁵.Allen & Tommasi (2001)

Situasi ini semakin menguat ketika melihat rendahnya tingkat pemanfaatan anggaran pada pos belanja operasional, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Di sisi lain, lemahnya sistem pengendalian internal turut menjadi faktor yang memperburuk efisiensi pengelolaan keuangan publik. Tidak adanya unit audit internal yang bersifat independen memperbesar potensi penyimpangan dan kesalahan dalam proses pelaksanaan anggaran. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, tetapi juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas institusi pemerintah. Minimnya keterbukaan informasi, pengambilan keputusan yang tidak konsisten, serta lemahnya mekanisme pengawasan internal menjadi hambatan utama dalam mewujudkan sistem pelaporan keuangan yang andal, akurat, dan layak dipercaya.⁶

Berdasarkan pemaparan kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, Kajian mendalam terhadap berbagai faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi hal yang sangat krusial, khususnya dalam konteks kelembagaan Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) di Timor-Leste. Kompleksitas dalam pengelolaan keuangan publik memerlukan pendekatan analitis yang mendalam agar dapat diidentifikasi secara komprehensif kendala maupun peluang perbaikan dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah.⁷

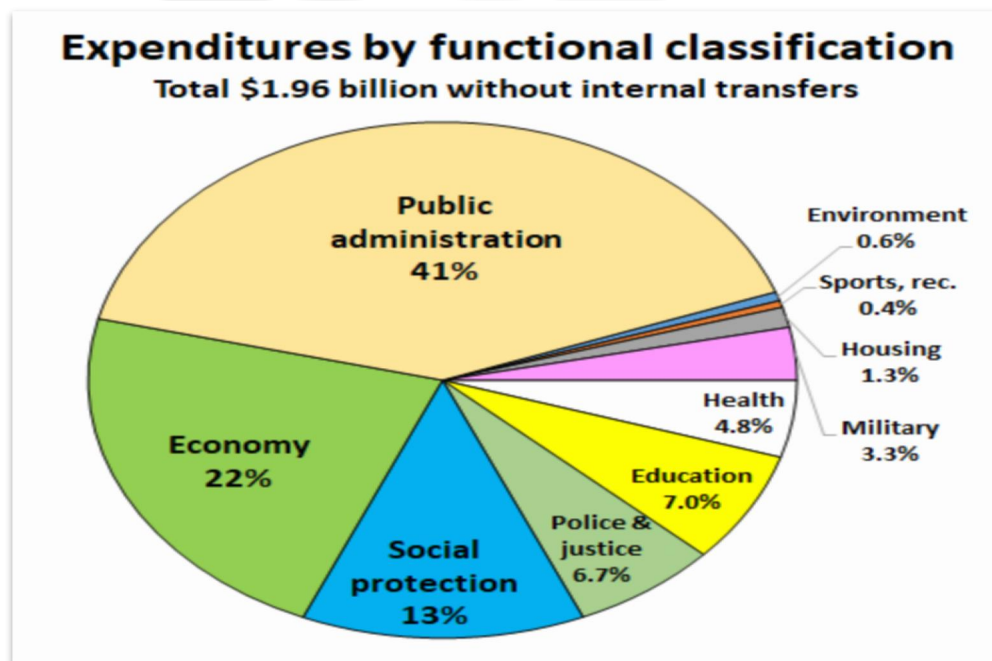
Pemerintah mengeluarkan Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Fungsional (*Budget rectification Expenditures by functional classification*) Per 1 Januari sampai akhir tahun Per 31 Desember 2023 dengan total sebesar \$1,96 miliar. Untuk belanja Administrasi Publik (41%), Sektor Ekonomi sekitar (22%), *Social Protection* mendapatkan 13%, *Police dan Justice* (6,7%), *Education*

⁶.Intosai, (2004)

⁷.Mardiasmo (2018, hlm. 12)

(7,0%) Kesehatan (4.8%), *Enviroment* (0.6%), *Sports,Rec* (0,4%), *Housing* (1.3%) *Militari* (3,3%)⁸

Gambar Grafik 1.1
Berdasarkan Klasifikasi Fungsional
(Budget rectification Expenditures by functional classification)
Timor Leste Per 1 Januari sampai akhir tahun Per 31 Desember 2023⁹



Sumber : La'o Hamutuk (berbagai laporan 2010–2023)

Grafik "2023 Budget Rectification: Expenditures by Functional Classification" menunjukkan proporsi belanja pemerintah Timor-Leste berdasarkan fungsi dalam anggaran tahun 2023, dengan total sebesar \$1,96 miliar (tidak termasuk transfer internal). Grafik ini mengungkapkan beberapa

⁸.Minister of Finance, Direktorat Anggaran Nasional yang ditampilkan dalam laporan anggaran revisi tahun 2023 biasa dikenal sebagai "Budget Book" atau *Relatório de Rectificação do Orçamento*.)

⁹.*Budget rectification Expenditures by functional classification*) Timor Leste Per (1 Januari sampai akhir tahun Per 31 Desember 2023)

masalah penting dalam alokasi anggaran yang perlu diperhatikan (Mardiasmo, 2018; Mahmudi, 2016) :¹⁰

Dominasi belanja untuk Administrasi Publik (41%) Alokasi terbesar anggaran sebagian besar dana negara masih difokuskan pada kegiatan birokrasi dan operasional pemerintahan. Dominasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa anggaran negara belum sepenuhnya diarahkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan.¹¹

Keseimbangan Pembangunan yang Belum Tercapai Sektor-sektor penting seperti Kesehatan (4.8%), Pendidikan (7.0%), dan Perumahan (1.7%) menerima porsi yang relatif kecil dibandingkan dengan total anggaran. Ini menunjukkan masih kurangnya prioritas terhadap pembangunan sumber daya manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.¹² Sektor Sosial dan Perlindungan Kurang Diperkuat Meskipun *Social Protection* mendapatkan 13%, jumlah ini masih bisa dianggap minim mengingat kondisi sosial-ekonomi masyarakat Timor-Leste yang masih menghadapi banyak tantangan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan akses layanan publik *International Monetary Fund* (IMF) 2023.

Rendahnya Perhatian pada Lingkungan dan Rekreasi Alokasi untuk sektor *Environment* (0.6%) dan *Sports & Recreation* (0.4%) sangat kecil. Ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial secara holistik. Hal ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup dan ketahanan lingkungan. *Asian Development Bank* (ADB) (2021)¹³. Risiko Ketidakefisienan Penggunaan Anggaran Ketimpangan dalam proporsi belanja ini juga dapat mencerminkan potensi inefisiensi dalam alokasi dan penggunaan anggaran, terutama jika belanja administratif tidak

¹⁰.Mardiasmo, 2018; Mahmudi, (2016)

¹¹. UNDP. (2022). *Human Development Report Timor-Leste*. Dili: United Nations Development Programme

¹². World Bank. (2023)

¹³.Asian Development Bank (ADB). (2021)

disertai dengan reformasi birokrasi dan transparansi anggaran World Bank. (2023)

Berdasarkan data yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan, Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) menetapkan proyeksi kebutuhan anggaran umum untuk tahun 2023 sebesar \$1.037.825,00. Anggaran ini kemudian dialokasikan ke dalam beberapa pos belanja utama, yaitu: Gaji Pegawai Negeri Sipil (*Salariu Vensimentu*) sebesar \$498.216,00, Belanja Barang dan Jasa (*Bens Servisu*) sebesar \$502.609,00, Belanja Modal Kecil (*Capital Minor*) sebesar \$34.000,00, serta Transfer kepada Publik (*Transferensia Públiku*) sejumlah \$3.000,00. Namun demikian, realisasi pelaksanaan anggaran menunjukkan bahwa tidak seluruh alokasi tersebut dapat diimplementasikan secara optimal sepanjang tahun berjalan. Terdapat ketidakseimbangan antara anggaran yang direncanakan dengan dana yang benar-benar digunakan, yang tercermin dari masih adanya saldo anggaran yang tidak terserap hingga akhir periode pelaporan. Kondisi ini menandakan bahwa efektivitas dalam pengelolaan anggaran masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek perencanaan dan eksekusi kegiatan di masing-masing kategori belanja (penjelasan laporan keuangan INAP) ¹⁴

Informasi lebih rinci mengenai struktur alokasi dan realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1, yang menyajikan ringkasan laporan keuangan INAP Timor-Leste pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Sumber: *Relatório de Execução Anual do OGE 2023*, Ministério das Finanças, Timor-Leste.¹⁵

¹⁴.Mahmudi, M. (2019)

¹⁵.*Relatório de Execução Anual do OGE 2023*, Ministério das Finanças, Timor Leste.

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Instituto Nasional Administrasi Publik
INAP-Timor Leste Per 1 Januari sampai akhir tahun
Per 31 Desember 2023

Ringkasan pelaksanaan anggaran umum tahun 2023 (Sumariu Exekusaun Orsamentu Jeral 2023)					
Total Anggaran Umum 2023 (Tol Orsamentu Jeral 2023)		\$ 1.037.825,00			
N u	Kebijaksanaan berdasarkan Kategori (Diskrisaun Por Kategoria)	Anggaran (Orsamentu 2023)	Jumlah Biaya (Total Gastos)	keseimbang an (Balansu)	% Belum Diimpleme ntasi
1	Salariu Vensimentu (Gaji Pegawai Negri Sipil)	\$ 498.216,00	\$ 420.679,7 7	\$ 77.536,23	\$77.536,23 (15,56%)
2	Bens Servisu (Barang Pelayanan)	\$ 502.609,00	\$ 306.475,0 8	\$ 230.133,9 2	\$230.133,9 2(45,79%)
3	Capital Minor (Modal Kecil)	\$ 34.000,00	\$ 27.996,00	\$ 6.004,00	\$6.004,00(17,66%)
4	Transferensia Públiku (Transferensia Publik)	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$	\$0,00 (0%)
Total		\$ 1.037.825,00	\$ 758.150,8 5	\$ 313.674,1 5	72.8%. (30,23%)

Sumber :Relatório Ministério das Finanças, Timor-Leste.

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Timor-Leste kepada *Instituto Nacional da Administração Pública* untuk tahun anggaran 2023 berjumlah sebesar \$1.037.825,00. Rincian anggaran tersebut meliputi: Gaji Pegawai Negeri Sipil (*Salariu Vensimentu*) sebesar \$498.216,00, dan yang diimpementasi (15,56%) Barang dan Pelayanan (*Bens Servisu*) sebesar \$502.609,00, dan yang diimpementasi (45,79%) Modal Kecil (*Capital Minor*) sebesar \$34.000,00, dan yang diimpementasi (17,66%) dan Transferensi Publik (*Transferensia Públiku*) sebesar \$3.000,00. Anggaran ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program strategis dan operasional yang telah dirancang oleh INAP

sepanjang tahun tersebut. Namun, hingga akhir tahun, realisasi penggunaan anggaran hanya mencapai \$758.150,85, atau sekitar 72,8% dari total anggaran yang tersedia. Artinya, terdapat sisa anggaran sebesar \$279.674,15 (27,8%) yang tidak terserap (Decreto-Lei N.º 1/2023 de 25 de Janeiro)¹⁶

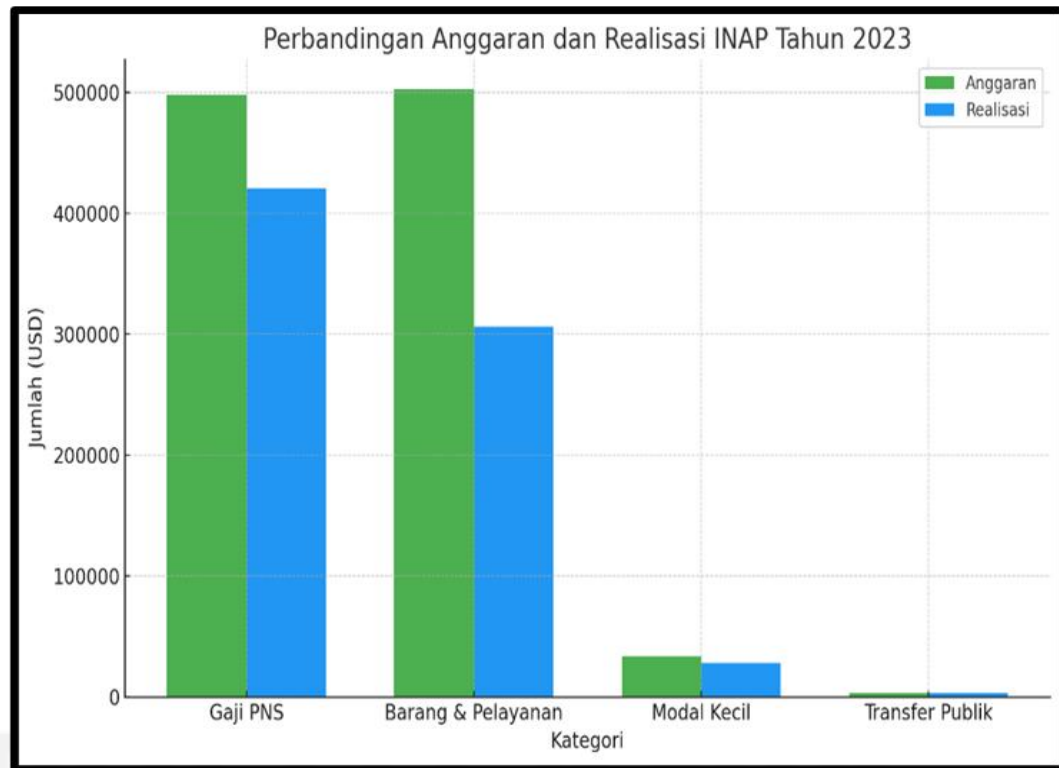
Dalam pengelolaan keuangan publik, keseimbangan antara anggaran yang dialokasikan dan anggaran yang direalisasikan merupakan indikator penting dalam menilai kinerja fiskal dan efisiensi program. Ketidakterserapan anggaran pada jumlah yang besar seperti yang ada di INAP pada tahun 2023 menunjukkan adanya tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Beberapa faktor yang berkontribusi antara lain: perencanaan anggaran yang tidak sepenuhnya berbasis pada data kebutuhan aktual, kendala dalam proses pengadaan, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi internal. Akibatnya, beberapa program penting yang telah dirancang tidak dapat dijalankan secara optimal.¹⁷

Dampak dari rendahnya serapan anggaran tidak hanya dirasakan dalam aspek teknis administrasi, tetapi juga dapat menurunkan efektivitas kelembagaan dan kualitas layanan publik yang diberikan. Ketidakseimbangan ini juga mencerminkan adanya celah dalam akuntabilitas dan transparansi, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi INAP dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya untuk memperkuat sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran, mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih responsif, serta memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar mampu diterjemahkan menjadi dampak nyata bagi publik. Reformasi pengelolaan keuangan yang berbasis prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik merupakan langkah penting menuju pelayanan publik yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

¹⁶ Mahmudi, 2016; Allen & Tommasi, (2001)

¹⁷ Mahmudi, 2016; Allen & Tommasi, (2001)

Gambar Grafik1.2.
Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Inap Tahun 2023¹⁸



Sumber : Instituto Nacional da Administração Pública

Grafik di atas memperlihatkan perbandingan antara anggaran yang dialokasikan dan realisasi belanja dari Instituto Nacional da Administração Pública Timor-Leste pada tahun 2023 berdasarkan empat kategori utama. Dari total anggaran sebesar \$1.037.825, realisasi belanja hanya mencapai \$758.150,85, atau sekitar 72,8%, menunjukkan adanya sisa anggaran sebesar \$313.674,15 yang belum digunakan. pemerintah Timor-Leste. (2024).¹⁹

Kategori Gaji Pegawai Negeri Sipil (Gaji PNS) menunjukkan realisasi sebesar \$420.679,77 dari anggaran \$498.216, atau sekitar 84,5% terserap, menandakan efisiensi relatif tinggi di sektor SDM. Namun, kategori Barang dan Pelayanan hanya menyerap sekitar 61%, yaitu \$306.475,08 dari anggaran \$502.609, menunjukkan potensi hambatan dalam pengadaan atau pelaksanaan

¹⁸ Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Inap (2023)

¹⁹ Pemerintah Timor-Leste. (2024).

program layanan pemerintah Timor-Leste. (2024).²⁰ Sementara itu, Modal Kecil (*Capital Minor*) menyerap \$27.996 dari anggaran \$34.000, sedangkan Transfer Publik terserap 100%. Secara keseluruhan, kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023 relatif baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam efisiensi dan percepatan realisasi terutama pada kategori belanja operasional. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa sisa anggaran yang besar tidak berulang di tahun-tahun mendatang pemerintah Timor-Leste (2024).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 Merupakan instrumen penting dalam menilai kondisi fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu komponen utama dari laporan tersebut adalah Neraca Pemerintah, yang merepresentasikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah secara menyeluruh. Melalui neraca ini, dapat dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran, tingkat efisiensi belanja negara, serta kapasitas fiskal dalam membiayai program pembangunan.²¹

Berdasarkan laporan neraca per 31 Desember 2023, posisi kas dan setara kas pemerintah tercatat sebesar Rp430,75 triliun, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp460,52 triliun. Penurunan ini merupakan indikator penting yang memerlukan kajian lebih lanjut guna menentukan apakah kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan dalam optimalisasi penyerapan anggaran atau justru mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan negara" (Mahmudi, 2016, hlm. 122; Mardiasmo, 2018, hlm. 253).

²⁰.Pemerintah Timor-Leste. (2024)

²¹. Mahmudi, (2016, Hlm. 140); Mardiasmo, (2018, Hlm. 250)

Gambar 1.3.
Neraca Keuangan Pemerintah Pusat Republik Indonesia
Neraca Per 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
ASET	D.2.1		
Aset Lancar	D.2.1.1		
Kas dan Setara Kas:	D.2.1.1.1		
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum	D.2.1.1.1.1	342.835.699.040.576	394.096.461.571.443
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.1.1.1.2	3.507.746.680.531	5.451.617.307.850
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.1.1.1.3	5.128.787.424.755	2.774.997.342.454
Kas dalam Transito	D.2.1.1.1.4	4.930.665.723	799.340.452
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.1.1.1.5	197.710.858.794	215.927.152.362
Kas di Bendahara Penerimaan	D.2.1.1.1.6	318.602.129.457	28.613.691.119
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.1.1.1.7	21.596.978.800.469	5.332.149.928.620
Kas pada BLU	D.2.1.1.1.8	57.124.640.159.483	52.624.849.776.050
Jumlah Kas dan Setara Kas		430.715.095.759.788	460.525.416.110.350
Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)	D.2.1.1.2	44.479.546.335	20.878.963.110
Investasi Jangka Pendek	D.2.1.1.3	35.230.294.868.007	26.341.869.598.933
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	D.2.1.1.4	29.180.110.096.058	50.582.083.648.060
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	D.2.1.1.5	15.268.713.521.615	17.562.805.658.048
Piutang:	D.2.1.1.6		
Piutang Perpajakan	D.2.1.1.6.1	117.416.962.637.093	114.374.519.793.761
Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.6.2	346.336.409.911.621	323.802.977.991.480
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.1.6.3	6.303.880.875	5.981.196.227
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	D.2.1.1.6.4	51.329.053.281	165.927.835.826
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)			
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	D.2.1.1.6.5	20.910.716.095.280	23.717.712.129.347
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.1.6.6	7.658.986.809.661	7.851.145.991.883
Piutang dari Kegiatan BLU	D.2.1.1.6.7	5.666.487.830.436	4.855.272.384.332
Piutang PFK	D.2.1.1.6.8	109.652.841	22.005.766
Jumlah Piutang (Bruto)		498.047.305.871.088	474.773.559.328.622
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	D.2.1.1.6.9	(318.262.010.449.930)	(324.433.224.802.061)
Jumlah Piutang (Bersih)		179.785.295.421.158	150.340.334.526.561
Persediaan	D.2.1.1.7	204.183.149.868.940	190.034.054.918.418
Jumlah Aset Lancar		894.407.139.081.901	895.407.443.423.480
Investasi Jangka Panjang	D.2.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	D.2.1.2.1		
Dana Bergulir	D.2.1.2.1.1	19.553.196.920.303	18.311.462.826.420
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.1.2.1.2	(1.562.930.032.200)	(4.813.478.526.898)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		17.990.266.888.103	13.497.984.299.522
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.1.3	280.412.334.935.034	239.872.791.752.439
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya diragukan Realisasinya	D.2.1.2.1.4	(945.649.215.159)	(760.196.912.027)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)		279.466.685.719.875	239.112.594.840.412
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		297.456.952.607.978	252.610.579.139.934
Investasi Jangka Panjang Permanen	D.2.1.2.2		
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	D.2.1.2.2.1	3.093.225.298.186.938	2.909.868.558.921.828
Investasi Permanen BLU	D.2.1.2.2.2	8.053.004.500	8.958.055.146
Investasi Permanen Lainnya	D.2.1.2.2.3	686.539.843.221.699	597.102.851.922.346
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		3.779.773.194.413.137	3.506.980.368.899.320
Jumlah Investasi Jangka Panjang		4.077.230.147.021.115	3.759.590.948.039.254
Aset Tetap	D.2.1.3		
Tanah	D.2.1.3.1	4.428.281.859.414.984	4.417.293.824.468.955
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	933.675.927.241.240	860.530.886.280.854
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	474.213.237.924.935	448.605.823.943.973
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.2.1.3.4	1.138.237.638.193.193	1.077.469.779.946.814
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	54.932.081.546.750	58.291.354.789.790
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	246.569.189.414.353	160.222.980.059.018
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(1.319.486.078.936.377)	(1.186.265.525.728.671)
Aset Konsesi Jasa	D.2.1.3.7	1.088.210.735.514.398	951.059.329.073.009
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		(80.340.569.263.966)	(57.322.310.734.895)
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		8.364.120.669.249.853	7.973.473.978.562.413
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.8	(1.399.826.648.200.343)	(1.243.587.836.463.566)
Jumlah Aset Tetap (Bersih)		6.964.294.021.049.510	6.729.886.142.098.847

Sumber : Neraca Keuangan Pemerintah Pusat 2023 Indonesia²²

Kas dan setara kas memegang peranan penting dalam menunjukkan tingkat likuiditas jangka pendek pemerintah, serta kemampuannya untuk memenuhi kewajiban rutin dan membiayai program-program prioritas. Penurunan saldo kas sebesar Rp29,78 triliun pada tahun 2023 dapat

²² Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023 Indonesia

diinterpretasikan sebagai peningkatan aktivitas belanja negara, khususnya untuk kegiatan yang bersifat produktif. Meski demikian, dibutuhkan analisis yang lebih mendalam guna memastikan apakah pengeluaran tersebut benar-benar memberikan hasil yang sebanding terhadap capaian pembangunan nasional. (Mardiasmo. 2018)²³ Jika penurunan kas tersebut diiringi dengan peningkatan aset produktif dan membaiknya layanan publik, maka hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran. Sebaliknya, jika kas hanya digunakan untuk pengeluaran jangka pendek tanpa memberikan dampak jangka panjang yang signifikan, maka efektivitas belanja publik patut dipertanyakan. Penurunan posisi kas, dalam hal ini, tidak dapat dilihat semata-mata sebagai keberhasilan serapan anggaran, melainkan harus dianalisis dalam kaitannya dengan *output* dan *outcome* yang dihasilkan..²⁴

Fenomena konsentrasi realisasi anggaran menjelang akhir tahun anggaran juga menjadi sorotan penting. Pola ini kerap menandakan lemahnya perencanaan awal dan koordinasi pelaksanaan antarlembaga. Pelaksanaan kegiatan secara tergesa-gesa pada penghujung tahun berpotensi menimbulkan pemborosan dan menurunkan kualitas belanja, sehingga tujuan pembangunan tidak tercapai secara optimal. Selain itu, rendahnya posisi kas negara dapat mengganggu stabilitas fiskal dalam jangka pendek, terutama jika pemerintah tidak memiliki cukup cadangan untuk menanggulangi kebutuhan mendesak atau pembiayaan rutin..²⁵

Dalam kerangka pengelolaan fiskal yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran menjadi hal yang krusial. Oleh karena itu, diperlukan sistem perencanaan kas yang fleksibel serta pemantauan yang konsisten terhadap dinamika fiskal negara. Transparansi dalam pelaksanaan anggaran juga tidak kalah penting. Penurunan kas tanpa penjelasan yang memadai dapat menimbulkan keraguan publik terhadap pengelolaan dana negara. Dalam sistem demokrasi yang terbuka, penyampaian

²³ Mardiasmo. (2018)

²⁴ . BPK RI (2022)

²⁵ . World Bank (2020)

informasi yang jujur, terstruktur, dan berbasis data merupakan wujud dari akuntabilitas yang harus dijaga. Kementerian Keuangan RI.²⁶

Publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan sejauh mana dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, laporan keuangan negara harus disertai narasi yang mampu menjelaskan capaian program secara terukur dan dapat diverifikasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran sebaiknya tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan, melainkan juga mencakup manfaat riil yang dihasilkan bagi masyarakat. Penurunan kas yang disertai dengan peningkatan aset tetap atau investasi jangka panjang, misalnya, dapat menjadi indikator positif selama diikuti oleh hasil yang konkret dan berkelanjutan.²⁷ Sebaliknya, peningkatan piutang negara, stagnasi dalam pelayanan publik, atau rendahnya realisasi belanja modal dapat mencerminkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, perlu diterapkan sistem evaluasi kinerja anggaran berbasis hasil (*result-based budgeting*), yang mampu menilai sejauh mana anggaran berkontribusi terhadap tujuan pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinamika pelaksanaan anggaran pemerintah pusat tahun 2023 menunjukkan kompleksitas yang tinggi. Meskipun terjadi peningkatan realisasi belanja, hal tersebut belum cukup untuk menyatakan bahwa implementasi anggaran berhasil secara menyeluruh. Efektivitas belanja hanya dapat dibuktikan melalui analisis atas hasil pembangunan yang dicapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran.²⁸

Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain: (1) memperkuat proses perencanaan berbasis kebutuhan dan kinerja; (2) meningkatkan kapasitas pengawasan dan evaluasi belanja; (3) mendorong percepatan realisasi program tanpa mengorbankan kualitas; dan (4) memperluas akses publik terhadap informasi fiskal untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi.

²⁶ Kementerian Keuangan RI. (2023)

²⁷ Mardiasmo, (2018, hlm. 158)

²⁸ Allen, R. & Tommasi, D. (2001)

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan anggaran negara menjadi lebih akuntabel, efektif, dan mampu mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi salah satu cerminan tata kelola fiskal yang akuntabel dan transparan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, tampak bahwa pemerintah terus menunjukkan upaya peningkatan dalam meningkatkan untuk menyampaikan informasi keuangan yang lebih akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan signifikan nilai aset tetap, yakni dari Rp6.729,88 triliun menjadi Rp6.964,29 triliun, yang menunjukkan bahwa belanja modal telah dicatat dengan baik dan sesuai prinsip akuntansi berbasis aktual.²⁹ Selain itu, peningkatan nilai investasi jangka panjang dari Rp3.759,59 triliun menjadi Rp4.077,23 triliun menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penguatan instrumen fiskal jangka panjang. Keterbukaan dalam mengungkap nilai dan jenis investasi ini turut memperkuat dimensi akuntabilitas publik. Dari sisi piutang, nilai bruto yang tercatat sebesar Rp498,04 triliun mengindikasikan adanya penerimaan yang masih tertunda. Namun, konsistensi dalam pencatatan menunjukkan perbaikan dalam sistem pengendalian penerimaan negara. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan RI.³⁰

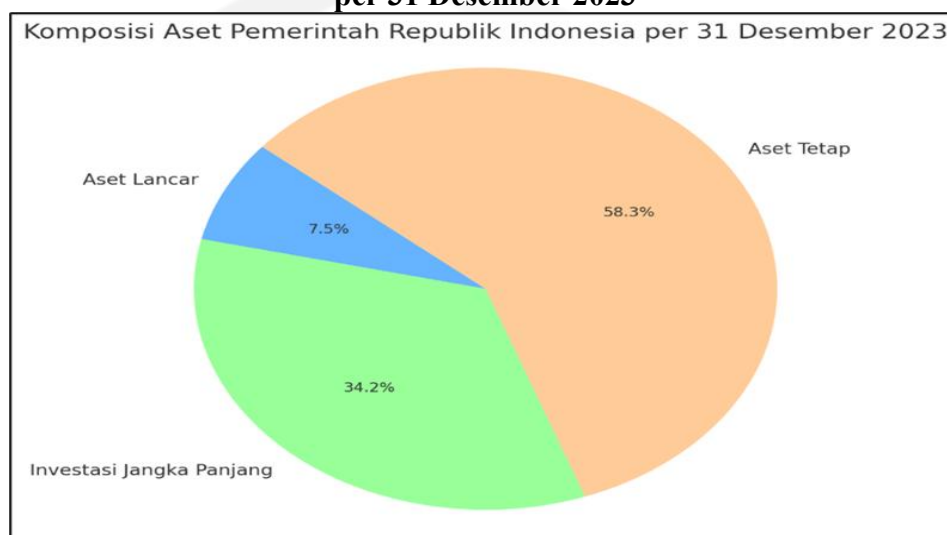
Terakhir, sinkronisasi antara laporan neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih memberikan gambaran yang terintegrasi mengenai posisi fiskal negara. Konsistensi ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan juga sebagai alat strategis untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Untuk memperkuat capaian ini, pemerintah perlu terus meningkatkan kapasitas SDM di bidang keuangan negara, memperbarui sistem

²⁹. Mardiasmo. (2018)

³⁰. Kementerian Keuangan RI. (2024)

informasi akuntansi, serta memperkuat pengawasan eksternal melalui BPK dan partisipasi aktif masyarakat. Sumber Pengolahan.³¹

Gambar Grafik.1.5.
Komposisi Aset Pemerintah Republik Indonesia
per 31 Desember 2023



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023³²

Grafik yang ditampilkan menggambarkan struktur aset Pemerintah Republik Indonesia per 31 Desember 2023, berdasarkan data dari neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Aset negara dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama yang mencerminkan prioritas dalam pengelolaan kekayaan negara.

- 1) Pertama, aset tetap menjadi porsi terbesar, yakni 58,3% dari total aset. Komponen ini mencakup tanah, gedung, jalan, jaringan, peralatan, dan mesin yang digunakan untuk mendukung layanan publik. Dominasi aset tetap menunjukkan orientasi pemerintah terhadap investasi jangka panjang di bidang infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkelanjutan.
- 2) Kedua, investasi jangka panjang menyumbang 34,2%, yang meliputi penyertaan modal negara pada BUMN, dana bergulir, serta dana abadi

³¹. Gary Bandy (2023 edisi ketiga)

³². Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023

untuk sektor pendidikan dan lingkungan. Kategori ini mencerminkan strategi pemerintah dalam memperkuat aset produktif dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

- 3) Ketiga, aset lancar hanya berkontribusi 7,5%, yang mencerminkan posisi likuiditas pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Sumber Pengolahan :Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023 Indonesia dan Timor Leste .³³

Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa mayoritas kekayaan negara berorientasi pada kepemilikan aset jangka panjang, baik dalam bentuk fisik maupun investasi strategis. Struktur ini menjadi pondasi penting bagi kesinambungan fungsi pemerintahan dan mendukung upaya pembangunan nasional secara berkelanjutan. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana program kerap kali terjadi ketika informasi mengenai alokasi, penggunaan, serta hasil pelaksanaan anggaran tidak disampaikan secara terbuka, lengkap, dan mudah diakses oleh pegawai maupun pemangku kepentingan terkait.

Kondisi ini meliputi tidak tersedianya laporan keuangan yang menjelaskan detail penggunaan dana, serta minimnya pelaporan mengenai hasil dan efektivitas program. Akibatnya, baik pegawai negeri maupun masyarakat sulit menilai apakah suatu program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketertutupan ini memicu keraguan atas akuntabilitas lembaga, termasuk dalam hal pencapaian target dan penggunaan anggaran negara secara tepat guna. Mardiasmo (2018. Halaman: 105–110). Selain itu, ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan oleh administrator lembaga, khususnya dalam implementasi anggaran program-program yang telah dirancang oleh *Instituto Nacional da Administração Pública*), turut memperparah permasalahan. Ketidakpastian dalam pelaksanaan anggaran menyebabkan sejumlah program tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan tahunan. Ketika pelaksanaan program tidak mengikuti perencanaan, maka pada akhir tahun fiskal akan muncul ketidaksesuaian antara

³³ Mardiasmo. (2018. Halaman 100–110)

realisasi dan rencana anggaran yang berdampak negatif pada kredibilitas laporan keuangan institusi.³⁴

Lemahnya pengawasan dalam pengelolaan dana juga menjadi tantangan serius, khususnya dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas ASN di Timor Leste. Tanpa sistem kontrol yang memadai, beberapa risiko yang mungkin timbul antara lain: potensi penyalahgunaan dana, ketidaktepatan alokasi anggaran (misalnya, lebih banyak digunakan untuk keperluan administratif daripada untuk kegiatan inti), serta menurunnya kualitas program pendidikan dan pelatihan. Ketiadaan mekanisme evaluasi yang kuat membuat lembaga sulit mengukur efektivitas program dan menghindari pemborosan. Untuk menilai kinerja keuangan dan efektivitas penggunaan anggaran, analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai salah satu alat evaluatif. Melalui pendekatan ini, data dalam laporan keuangan dapat dianalisis untuk mengungkapkan makna dan kinerja keuangan institusi dari tahun ke tahun. Di *Instituto Nacional da Administração Pública*, proses ini mencakup analisis laporan posisi keuangan, alokasi dan realisasi anggaran, serta pencapaian program kerja. Karena itu, laporan keuangan harus disusun secara menyeluruh dan objektif, mengakomodasi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal..³⁵

Kualitas laporan keuangan sektor publik sendiri mencerminkan tingkat pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana publik yang bersumber dari pajak, retribusi, dan berbagai transaksi lainnya. Oleh karena itu, laporan keuangan harus mampu memberikan gambaran utuh tentang pengelolaan keuangan negara secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika publik.³⁶ Namun demikian, tantangan besar yang dihadapi *Instituto Nacional da Administração Pública* adalah belum adanya unit audit internal

³⁴. Mahmudi, (2016, hlm. 112); Mardiasmo, (2018, hlm. 132)

³⁵. Mardiasmo, (2018, hlm. 212)

³⁶. Menurut Masmudi (2003, hlm. 77)

yang kompeten untuk mengawasi implementasi program dan menelaah laporan keuangan yang disusun oleh administrator keuangan. Lemahnya pengawasan ini mengakibatkan kesulitan dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Risiko yang muncul antara lain adalah pemborosan dana, ketidaksesuaian pencatatan transaksi, pelanggaran terhadap standar akuntansi, serta potensi terjadinya penyimpangan yang luput dari deteksi. Ketiadaan mekanisme audit juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas *Instituto Nacional da Administração Pública* sebagai lembaga yang seharusnya menjadi panutan dalam tata kelola pemerintahan yang baik.³⁷

Laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Indonesia dan Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Timor-Leste menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam berbagai aspek, termasuk regulasi, standar akuntansi, struktur pelaporan, sistem pengawasan, dan kapasitas kelembagaan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis aktual secara menyeluruh sejak tahun 2015, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan disusun oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (LKKL) dengan format yang terdiri dari enam komponen utama, lalu dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Seluruh proses pelaporan ini diawasi secara independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Di sisi lain, INAP Timor-Leste masih menggunakan sistem pelaporan berbasis kas menuju aktual, yang tergolong lebih sederhana. Laporan keuangannya umumnya terbatas pada penyajian anggaran dan realisasi belanja, serta belum sepenuhnya mengadopsi format pelaporan standar internasional, seperti neraca dan laporan arus kas. Selain itu, kelembagaan pengawasan internal di INAP masih menghadapi tantangan, mengingat belum adanya unit audit internal yang bersifat independen serta belum digunakannya sistem

³⁷ Kuntadi (2019, Bab 6–7)

informasi keuangan yang terintegrasi sebagaimana diterapkan di Indonesia melalui aplikasi SAKTI dan SPAN. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa meskipun kedua negara sama-sama memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi fiskal, Indonesia menunjukkan kemajuan yang lebih signifikan dalam praktik akuntabilitas dan tata kelola keuangan publik, khususnya melalui infrastruktur regulasi dan teknologi informasi yang mendukung proses pelaporan secara lebih andal dan transparan

Tabel 1.6.
Perbandingan Laporan Keuangan
Pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste
Tahun 2023

Aspek	Pemerintah Indonesia	INAP Timor-Leste
Dasar Hukum	PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP	Decreto-Lei N.º 1/2023 de 25 de Janeiro
Standar Akuntansi	Akrual penuh (Standar Akuntansi Pemerintahan / SAP)	Cash toward Accrual (kas menuju akrual)
Struktur Laporan	6 komponen: LRA, LO, Neraca, LAK, LPSAL, CaLK	Ringkasan alokasi dan realisasi anggaran tahunan
Lembaga Penyusun	Kementerian/Lembaga menyusun LKKL → dikonsolidasikan oleh Kementerian Keuangan → LKPP	INAP menyusun sendiri berdasarkan pengalokasian dari OGE
Pengawasan Eksternal	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tribunal de Contas Timor-Leste (lembaga audit nasional)
Pengawasan Internal	Inspektorat Jenderal dan Unit Audit Internal	Belum memiliki unit audit internal independen
Sistem Informasi Keuangan	SPAN, SAKTI, SIMAK BMN	Manual & Excel; belum menggunakan sistem terpadu
Pelaporan Aset & Liabilitas	Lengkap: Aset Tetap, Investasi Jangka Panjang, Liabilitas, Ekuitas	Tidak semua dicatat; fokus pada anggaran belanja operasional
Transparansi & Publikasi	Dipublikasikan secara terbuka melalui DJPB, Kemenkeu, BPK	Dipublikasikan terbatas melalui laporan tahunan OGE
Fungsi Evaluatif	Digunakan untuk penyusunan APBN, evaluasi program berbasis hasil	Lebih bersifat administratif, belum sepenuhnya digunakan sebagai alat evaluasi

Sumber :pengolahan data Peneliti 2025

Perbandingan laporan keuangan antara Pemerintah Indonesia dan Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Timor-Leste tahun 2023 memperlihatkan perbedaan mendasar dari aspek regulasi, teknis akuntansi, hingga kelembagaan pelaporan. Pemerintah Indonesia menerapkan Standar

Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual penuh sesuai PP No. 71 Tahun 2010, yang menghasilkan laporan keuangan komprehensif dengan enam komponen utama, seperti neraca dan laporan arus kas. Sebaliknya, INAP Timor-Leste masih menggunakan pendekatan *Cash Toward Accrual* berdasarkan *Decreto-Lei N.º 1/2023*, yang menghasilkan laporan terbatas pada anggaran dan realisasi belanja, tanpa komponen pelaporan yang mencerminkan posisi keuangan secara menyeluruh.

Dari sisi kelembagaan dan infrastruktur, Indonesia memiliki sistem pelaporan yang lebih maju dan terintegrasi secara digital melalui aplikasi seperti SPAN, SAKTI, dan SIMAK BMN, serta didukung pengawasan internal dan eksternal yang kuat. Laporan disusun secara konsolidatif oleh Kementerian Keuangan dan diaudit independen oleh BPK. Di sisi lain, INAP menyusun laporan secara manual dan terpisah, tanpa dukungan sistem informasi keuangan terpadu, serta belum memiliki unit audit internal independen. Akibatnya, laporan keuangan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data, sedangkan laporan keuangan INAP masih terbatas pada fungsi pencatatan anggaran secara administratif.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji secara mendalam isu yang diangkat, dengan mengusung judul sebagai berikut **“Analisis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Timor-Leste”**, dengan harapan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan manajemen keuangan publik di lembaga tersebut dan pemerintahan secara umum.³⁸

³⁸ Mardiasmo (2018)

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada Latar Belakang Masalah, ada beberapa upaya yang dilakukan sebagai bentuk Keterbukaan Informasi pada *Instituto Nacional da Administração Público (INAP)* adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan pelaporan keuangan pada *Instituto Nacional da Administração Público (INAP)* belum konsisten.
2. Banyak laporan keuangan yang tidak akurat atau tidak mencerminkan kondisi dengan tepat.
3. Tidak transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan pada program Pendidikan dan pelatihan sehingga dapat mengurangi kepercayaan publik dan *stakeholder* terhadap *Instituto Nacional da Administração Público (INAP)*.
4. Ada kemungkinan anggaran yang dialokasikan tidak digunakan secara efisien, sehingga mengakibatkan pemborosan dan tidak ada hasil yang maksimal dari program diklat. Sehingga dapat mengakibatkan tidak efektifitas-nya laporan keuangan.
5. Sistem pengelolaan keuangan yang tidak terintegrasi, sehingga meningkatkan risiko kesalahan pencatatan atau pelaporan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pokok-pokok persoalan sebagai berikut :

1. Mengapa kualitas laporan keuangan pada program-program di Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Timor-Leste belum mencapai tingkat optimal ?
2. Bagaimana strategi peningkatan laporan keuangan yang lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel pada program Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Timor-Leste ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan belum optimalnya kualitas laporan keuangan pada program-program yang dilaksanakan oleh Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Timor-Leste.
- b. Mengkaji serta merumuskan strategi peningkatan laporan keuangan yang lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel guna mendukung efektivitas pelaksanaan program di lingkungan INAP Timor-Leste.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga baik bagi perkembangan keilmuan atau akademis maupun pihak yang memanfaatkan hasil penelitian ini. Secara rinci, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Mardiasmo (2018) hlm. 22–25, 253³⁹. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah yang berarti dalam penguatan Program Magister Terapan, khususnya pada bidang kajian penyelenggaraan keuangan negara yang kian kompleks dan menuntut respons adaptif terhadap dinamika lingkungan bisnis maupun tata kelola pemerintahan modern. Dari sisi teoritis, temuan penelitian ini berpotensi memperkaya pemahaman atas implementasi konsep-konsep manajemen keuangan dalam praktik sektor publik. Selain itu, prinsip-prinsip manajemen perubahan meliputi kesadaran (*awareness*), kemauan (*desire*), pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan penguatan (*reinforcement*) yang diharapkan dapat menjadi acuan konseptual dan metodologis bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat isu-isu.

2. Manfaat Peneliti

³⁹ Mardiasmo (2018) hlm. 22–25, 253

Bagi peneliti, ⁴⁰. Penyusunan tesis ini diharapkan menjadi wahana pembelajaran yang mendalam, baik dari segi konseptual maupun empiris, khususnya dalam menelaah berbagai strategi peningkatan kualitas laporan keuangan pada program-program yang dijalankan oleh Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Timor-Leste. Melalui proses ini, peneliti memperoleh kesempatan untuk memperkaya pengalaman akademik sekaligus memperdalam pemahaman terhadap dinamika tata kelola keuangan sektor publik, terutama dalam konteks institusi pemerintahan di negara berkembang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

⁴⁰ Bagi peneliti, Sugiyono (2019)⁴⁰.

Dengan sinergi antara peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kepemimpinan yang kuat, regulasi yang memadai, dan dukungan pengembangan ilmu pengetahuan, kualitas pelaporan keuangan di lingkungan INAP Timor-Leste diharapkan dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Pada akhirnya, tata kelola keuangan yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab akan menjadi pondasi penting dalam memperkuat akuntabilitas publik serta mendukung pencapaian tujuan institusional secara optimal



DAFTAR PUSTAKA

- Adha Inapty, M. A. F. B., & Martiningsih, R. S. P. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD di Pemprov NTB). *Akuntabilitas*, 9(1), 27–42.
- Alviola, S., Fernandes, J., & Tilman, C. (2023). *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Timor-Leste*. Dili: Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL).
- American Journal of Sociology. (2019). Pengaruh Akuntansi Auditor dan Independensi Auditor terhadap Hasil Kerja Auditor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Anastasia, D., & Tjiptono, F. (2021). *Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andriyani, N. (2020). *Jurnal akuntansi dan keuangan universitas jambi*. 5(2), 132–144
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023*. Jakarta: BPK RI. <https://www.bpk.go.id>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023*. Jakarta: BPK RI.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). *Statistik Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Djanegara, M. S. (2017). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 461.
- Fauzi, G. R. (2019). *Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Febrianto, I. M. B., Yuniarta, G. A., & Sujana, E. (2017). Kualitas Akuntabilitas Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).

- Febrian Cahyo Pradono, & Basukianto. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(2), 1–13.
- Gamayuni, R. R. (2019). the Initial Implementation of Accrual Based Accounting, the Effect on Performance and Financial Reporting Quality At Local Governments in Indonesia. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 13.
- Ginting, A. (2011). Hard Milling of Hardened Tool Steel: Tool Wear and Tool Life. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, 7(4), 96–99.
- Hanaffi, R. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati). *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Surakarta*. 12, 25-27.
- Harahap, S. H. (2012). *Implementasi Prosedur Akuntansi Berbasis AKrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. 66, 37–39.
- Hadi, S. (1993). *Metodologi Research* (Vol. 1). Yogyakarta: Andi Offset.
- Handi, Ahmad.(2017) 7 Pihak Yang Membutuhkan Secara Langsung Laporan Keuangan.
- Hanaffi, R. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati). *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Surakarta*. 12, 25-27.
- Hartikayanti, H. N. (2024). *Pengaruh Faktor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Studi pada Lembaga Publik di Asia Tenggara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Herawati, Tuti.(2014) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Cianjur). *Jurnal Study and Accounting Research*, Vol. XI No. 1.
- Herdiansyah, H. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Instituto Nacional da Administração Pública (INAP). (2024). *Relatório Anual de Atividades e Finanças de 2023*. Díli: INAP Timor-Leste.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*, 22(1), 1–14.
- Karunia, A. P., Payamta, P., & Sutaryo, S. (2019). The Implementation of Accrual-based Accounting in Indonesian Government: Has Local Government Financial Statement Quality Improved? *Journal of Accounting and Investment*, 20(2). <https://doi.org/10.18196/jai.2002115>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Retrieved from <https://www.djpbk.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 (LKPP 2023)*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Maith, Hendry Andres.(2013) Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna TBK. Jurnal EMBA.
- Martani, Dwi. PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan (Berkas PDF). Diambil dari iaiglobal.or.id/V03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak.
- Marliyah, Marliyah, M. Ridwan, and Ayu Kartika Sari. "The Effect of E-Service Quality on Satisfaction and Its Impact on Customer Loyalty of Mobile Banking Users (Case Study of Bank Syariah Mandiri KCP Belawan)." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 4.2 (2021): 2717-2729
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. (untuk kutipan tahun 2005 yang juga disebutkan)
- Nilamsari, Y., Sukesti, F., Alwiyah, A., Hanum, A. N., & Ery, R. (2020). *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi OPD Kota Semarang*. 10(2), 85–94.
- Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste. (2023). *Decreto-Lei N.º 1/2023 de 25 de Janeiro*. Díli: Jornal da República.
- Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste. (2022). *Lei n.º 15/2022 de 21 de Dezembro – Orçamento Geral do Estado para 2023*. Díli: Jornal da República.
- Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste. (2022). *Decreto-Lei N.º 71/2022 de 28 de Setembro*. Díli: Jornal da República.
- Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste. (2012). *Decreto-Lei N.º 38/2012 Formasaun ba Servisu Publiku*. Díli: Jornal da República.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- República Democrática de Timor-Leste. (2023). *Decreto-Lei N.º 1/2023 de 25 de Janeiro sobre Sistema de Contabilidade Pública*. Díli: Imprensa Nacional.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rifandi, Z. W. (2019). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 04(01), 1–17.
- Sari, D. (2012). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi & Bisnis*, 718–
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja*, 20(2), 179.

- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (Edisi revisi dari edisi 2017)
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surastiani, D. P., & Handayani, B. dwi. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 6.
- Suparman, M., Batam, U. I., & Phua, L. K. (2013). *Transparency And Accountability In The Public Sector : Analysing. 2nd A4-PFM Conference TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN THE PUBLIC SECTOR : October*.
- Tribunal de Contas Timor-Leste. (2024). *Relatório Anual da Execução Orçamental 2023*. Díli: TdC-TL. Retrieved from <https://www.tcontas.tl>
- Tribunal de Contas Timor-Leste. (2023). *Relatório de Auditoria das Contas do Estado de Timor-Leste 2023*. Díli: TdC.
- Trimarstuti, J. (2019). Transparency and Public Accountability through Public Sector Accounting: The Use of ‘Value For Money’ Concept in Indonesia. *International Journal of Engineering Technology and Natural Sciences*, 1(1), 30–33.
- Undang-Undang Dasar Republik Demokratik Timor-Leste. (2002). *Constituição da República Democrática de Timor-Leste*. Díli: Jornal da República.
- Undang-Undang Republik Demokratik Timor-Leste. (2022). *Lei n.º 2/2022 de 10 de Fevereiro – Gestão das Finanças Públicas*. Díli: Jornal da República.
- Upabayu, I. P., Mahaputra, R., & Putra, I. W. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2), 139–149.
- Yuhertiana, I. (2015). Behavioural public sector accounting research in Indonesia: a literature review. *Malaysian Accounting Review*, 14(1), 50–64.
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Bisnis & Ekonomi*, 14(1), 56–64.

Yuliati, R., Yuliansyah, Y., & Adelina, Y. E. (2019). The implementation of accrual basis accounting by Indonesia's local governments. *International Review of Public Administration*, 24(2), 67–80.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A